

# Investasi Pemerintah di Sumatera Barat: Perkembangan, Sasaran dan Kebijaksanaan\*

Rustian KAMALUDDIN  
Iswandi ISKANDAR\*\*

## PENDAHULUAN

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu komponen utama yang diperlukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai akan ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-masing sektor ekonomi. Hubungan antara perubahan pendapatan dengan perubahan investasi ditentukan pula oleh angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat dalam masa Repelita Keempat diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 6,0% per tahun. Sedangkan dalam tahun pertama dan kedua masa Repelita Kelima (1989-1990) laju pertumbuhan tersebut diperkirakan rata-rata sebesar 7,0% per tahun. Sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi di atas maka diperlukan pula sejumlah investasi tertentu baik yang berasal dari sumber sektor pemerintah maupun dari sumber sektor non-pemerintah. Oleh sebab itu kedua sumber investasi di atas perlu dianalisa dan diperkirakan baik secara total maupun alokasinya pada masing-masing sektor ekonomi.

Di dalam struktur perekonomian Indonesia terdapat 3 unsur yang perlu dikembangkan secara serasi, yaitu pemerintah, swasta dan koperasi. Dari ketiga unsur ini maka peranan yang besar diberikan kepada sektor swasta dan koperasi, sedangkan peranan pemerintah adalah bersifat mendorong atau me-

\*Bagian dari laporan hasil studi *West Sumatra: Comprehensive Investment Profiles* yang disusun oleh penulis.

\*\*Drs. Rustian Kamaluddin adalah Lektor Kepala Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Drs. Iswandi Iskandar adalah Staf Bappeda Kotamadya Padang.

menunjang dengan menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha. Dengan semakin besarnya peranan sektor swasta maka berarti bahwa kebutuhan investasi di sektor tersebut akan jauh lebih meningkat di masa-masa mendatang. Ini berarti pula bahwa sumber-sumber pembiayaan bagi investasi sektor swasta perlu digali dan ditingkatkan sejauh mungkin. Di samping itu investasi sektor pemerintah perlu pula diarahkan kepada lapangan atau kegiatan yang dapat menunjang perkembangan sektor swasta, yaitu dengan menciptakan dan meningkatkan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi pengembangan sektor swasta tersebut.

Analisa pada bagian ini akan mencoba mengungkapkan hubungan dan peranan investasi dalam mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, baik dalam waktu yang telah lalu maupun pada masa-masa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan perkiraan target laju pertumbuhan ekonomi akan dicoba untuk memperkirakan besarnya investasi yang dibutuhkan. Analisa mendalam akan diberikan kepada investasi sektor pemerintah yang akan diperinci menurut Investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari analisa tersebut akan dicoba untuk merumuskan rekomendasi kebijaksanaan yang perlu ditempuh dalam masa-masa mendatang, yaitu sampai tahun 1990.

## PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN INVESTASI

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam Pelita Kesatu, Kedua, dan Ketiga berturut-turut adalah meningkat rata-rata 6,1%, 7,2% dan 6,8%. Seiring dengan itu jumlah investasi meningkat pula dalam masa tersebut yaitu: Pelita Kesatu Rp 41,3 milyar, Pelita Kedua Rp 272,7 milyar, dan Pelita Ketiga sebesar Rp 909,6 milyar. Sedangkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto dalam masa tersebut adalah Rp 448,5 milyar, Rp 1.205,2 milyar, dan Rp 3.504,6 milyar.

Berdasarkan kepada angka-angka tersebut, maka terdapat angka ICOR dalam Pelita Kesatu sebesar 1,51; Pelita Kedua 3,14; dan Pelita Ketiga 3,82. Keadaan ini telah menunjukkan bahwa untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat di Sumatera Barat telah diperlukan jumlah investasi yang semakin besar. Hal ini memberikan indikasi pula bahwa tiga masa Pelita tersebut telah diperlukan peningkatan jumlah sumber pembiayaan yang semakin besar. Ini terbukti dari persentasi investasi terhadap PDBR yang semakin meningkat, yaitu dalam Pelita Kesatu 9,2%, Pelita Kedua 22,6%, dan Pelita Ketiga sebesar 26,0%.

Angka ICOR Indonesia telah diperkirakan pada akhir Pelita Kedua dan akhir Pelita Ketiga sebesar 3,05 dan 3,80.<sup>1</sup> Dengan demikian maka ICOR Sumatera Barat relatif hampir sama dengan ICOR Indonesia, di mana rata-rata Indonesia sedikit lebih rendah. Sedangkan perbandingan investasi dengan PDBR menunjukkan pula indikasi yang sama, di mana rata-rata Indonesia relatif lebih rendah, yaitu akhir Pelita Kedua sebesar 21,2% dan akhir Pelita Ketiga 24,6%.<sup>2</sup>

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Indonesia telah diperkirakan meningkat pada masa-masa mendatang. Dalam masa Repelita Keempat, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat rata-rata 5,0% dan Sumatera Barat sebesar 6,0% per tahun. Kedua angka ini relatif lebih rendah daripada angka Pelita Ketiga yaitu masing-masing sebesar 6,5% dan 7,0% per tahun. Tetapi sebaliknya angka ICOR diperkirakan akan menjadi lebih besar. ICOR Indonesia diperkirakan mencapai 5,34 dalam Repelita Keempat,<sup>3</sup> sedangkan di Sumatera Barat diperkirakan sebesar 4,12.<sup>4</sup> Peningkatan ini disebabkan terutama karena penggunaan teknologi yang semakin tinggi sehingga memerlukan modal yang relatif jauh lebih besar. Namun demikian angka ICOR di Sumatera Barat akan berada di bawah angka Indonesia, yang berarti bahwa kemajuan dalam teknologi pada pemakaian modal tidak akan sepesat di Indonesia secara keseluruhan.

Sebagaimana halnya yang diperkirakan secara nasional, maka tingkat inflasi di Sumatera Barat sebesar 8,0% per tahun dalam masa Repelita Keempat. Angka ini jauh lebih rendah dari Pelita Ketiga yaitu sebesar 14,6%.

Perubahan dalam komposisi-komposisi di atas akan mengubah pula pola peningkatan investasi di Sumatera Barat. Hal ini akan lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 1.

Untuk mencapai target jumlah PDBR seperti dikemukakan di atas dibutuhkan jumlah investasi yang semakin besar. Dalam tahun 1984/85 kebutuhan investasi di Sumatera Barat adalah sekitar 20,6% dari jumlah PDBR menurut harga berlaku. Angka ini kemudian meningkat menjadi 29,5% pada tahun 1990/91. Kenaikan jumlah investasi ini tercermin pula dalam kenaikan

<sup>1</sup>Hendra Esmara, *Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia*, Lembaga Penelitian Ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, 1982, hal. 79.

<sup>2</sup>Hendra Esmara, *ibid.*, hal. 78.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, 1984/85 - 1988/89*.

<sup>4</sup>Dihitung dari *Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, 1984/85 - 1988/89*, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Buku Ke-1, hal. 3.9. - 3.11 dan hal. 7.5. - 7.6.

Tabel 1

PERKIRAAN PRODUK DOMESTIK BRUTO REGIONAL DAN  
KEBUTUHAN INVESTASI, 1984/85 - 1990/91  
(dalam milyar rupiah)

Tahun	PDBR		Indeks Implisit (1975 = 100)	Laju Pertumbuhan PDBR	ICOR	Kebutuhan Investasi <sup>a</sup>
	Harga Berlaku	Harga Konstan				
1983/84	948,7	320,8	295,7	4,1	4,00	155,6
1984/85	1.096,6	337,1	325,3	5,1	4,03	225,4
1985/86	1.261,0	355,7	354,5	5,5	4,06	281,6
1986/87	1.443,6	377,0	382,9	6,0	4,09	354,2
1987/88	1.643,9	401,2	409,7	6,4	4,12	433,5
1988/89	1.864,5	429,3	434,3	7,0	4,15	541,6
1989/90	2.114,7	459,4	460,1	7,0	4,18	618,8
1990/91	2.398,5	491,5	488,1	7,0	4,21	707,0
Laju Pertum- buan (%)	14,2	6,3	7,4	6,3	4,12	24,1

<sup>a</sup> Menurut harga berlaku.

angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang meningkat dari 4,03 dalam tahun 1984/85 menjadi 4,12 dalam tahun 1990/91.

Laju pertumbuhan ekonomi dalam periode 1983/84 - 1990/91 diperkirakan meningkat rata-rata 6,5% per tahun berdasarkan harga konstan tahun 1975 atau sebesar 14,2% menurut harga berlaku. Untuk mencapai target tersebut di atas, maka jumlah investasi perlu ditingkatkan sebesar 24,1% per tahun berdasarkan harga berlaku. Angka ini sedikit lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan investasi Indonesia (nasional) yaitu sebesar 19,1%,<sup>1</sup> namun masih di bawah angka laju pertumbuhan investasi Sumatera Barat dalam Pelita Ketiga sebesar 25,8% per tahun.<sup>2</sup> Di dalam Buku Rancangan-Rencana Keempat Sumatera Barat telah diperkirakan kebutuhan investasi sebesar Rp 1.836,3 milyar. Sedangkan sampai tahun 1990/91 kebutuhan investasi ini akan mencapai Rp 3.162,1 milyar. Berarti dalam periode dua tahun berikutnya diperlukan tambahan investasi sebesar Rp 1.325,8 milyar atau meningkat sebesar 72,2% dari Pelita Keempat.

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *op. cit.*

<sup>2</sup>Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, *ibid.*

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut di atas, maka seluruh sumber pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan. Sumber investasi secara garis besarnya dibagi atas dua macam yaitu investasi pemerintah dan investasi non-pemerintah. Yang dimaksud dengan investasi pemerintah di sini adalah yang disalurkan melalui anggaran belanja negara (pemerintah pusat) dan anggaran belanja daerah (pemerintah daerah), sedangkan investasi non-pemerintah adalah yang berasal dari luar anggaran belanja negara/daerah. Komposisi investasi sejak masa Pelita Kesatu sampai masa Pelita Ketiga menunjukkan bahwa investasi pemerintah telah memberikan sumbangan yang cukup besar. Peranan investasi pemerintah dalam Pelita Kesatu adalah 53,4%, Pelita Kedua 45,4%, dan Pelita Ketiga sebesar 53,9%. Dengan demikian ternyata bahwa peranan investasi pemerintah ini telah semakin besar pula dalam masa tiga periode Pelita di atas. Namun dalam masa-masa mendatang peranan investasi pemerintah tersebut diperkirakan relatif tidak akan sebesar yang dicapai dalam masa-masa sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam Anggaran Pembangunan Negara (APBN) yang merupakan sumber terbesar dari pembiayaan pemerintah di Sumatera Barat diperkirakan akan relatif lebih kecil pula pada masa mendatang. Peningkatan Anggaran

Tabel 2

PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN INVESTASI MENURUT SUMBER  
DI SUMATERA BARAT (dalam milyar rupiah)

Periode Tahun	Pemerintah		Non-Pemerintah		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pelita I <sup>a</sup>	21,4	51,8	19,9	48,2	41,3	100,0
Pelita II <sup>a</sup>	129,0	47,3	143,7	52,7	272,7	100,0
Pelita III <sup>b</sup>	491,5	54,0	418,1	46,0	909,6	100,0
Repelita IV <sup>b</sup>	858,4	46,7	977,9	53,3	1.836,3	100,0
1984/85	125,2	55,5	100,2	44,5	225,4	100,0
1985/86	145,4	51,6	136,2	48,4	281,6	100,0
1986/87	168,1	47,5	186,1	52,5	354,2	100,0
1987/88	194,5	44,9	239,0	55,1	433,5	100,0
1988/89	225,2	41,6	316,4	58,4	541,6	100,0
1989/90 <sup>c</sup>	261,0	42,2	357,8	57,8	618,8	100,0
1990/91 <sup>c</sup>	302,7	42,8	404,3	57,2	707,0	100,0
1984/85 - 1990/91	1.422,1	45,0	1.740,0	55,0	3.162,1	100,0

Sumber: <sup>a</sup> Repelita III Sumatera Barat.

<sup>b</sup> Rancangan Repelita IV Sumatera Barat.

<sup>c</sup> Angka perkiraan.

Pembangunan Negara yang relatif alokasi APBD tersebut ke daerah-daerah, termasuk Sumatera Barat.

Perkembangan investasi menurut sumber di atas sejak Pelita Kesatu secara lebih jelas dapat diperhatikan dalam Tabel 2.

Dari angka-angka dalam Tabel 2 tersebut terlihat bahwa peranan investasi pemerintah turun dari 54,0% pada Pelita Ketiga menjadi 46,7% pada Repelita Keempat. Pada awal Repelita Keempat peranan investasi pemerintah ini masih tetap tinggi, yaitu mencapai 55,5%. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya akan terus menurun sehingga mencapai 41,6% pada akhir Repelita Keempat tahun 1988/1989. Sedangkan untuk masa dua tahun berikutnya yaitu 1989/90 dan 1990/91 peranannya kembali menaik yaitu menjadi 42,2% dan 42,8%. Dengan menurunnya peranan investasi pemerintah di atas maka untuk memenuhi kebutuhan investasi pada masa mendatang akan lebih banyak diharapkan dari sumber non-pemerintah, yaitu dari masyarakat, swasta (dalam dan luar negeri), lembaga perbankan, dan lain-lain.

### SUMBER PEMBIAYAAN SEKTOR PEMERINTAH

Sesuai dengan sistem pemerintahan di daerah, maka sumber pembiayaan pembangunan pemerintah di daerah terdiri dari 3 macam, yaitu: (a) Anggaran Pembangunan Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Daerah; (b) Anggaran Pembangunan yang berasal dari Daerah sendiri (APBD Tingkat I dan Tingkat II). Anggaran Pembangunan Pemerintah Pusat, yaitu yang berasal dari APBN dialokasikan ke Daerah dalam dua macam bentuk, yaitu: anggaran proyek-proyek Pelita Nasional (disebut Proyek Sektoral) dan sumber pembiayaan dalam bentuk Program Bantuan Inpres.

Investasi yang berasal dari dana pembiayaan proyek sektoral merupakan anggaran pembangunan Pemerintah Pusat yang berlokasi di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Pemerintah Pusat di daerah. Dana pembiayaan ini digunakan untuk pembangunan sektor-sektor ekonomi dan sosial yang pada umumnya dititikberatkan kepada pembangunan prasarana dan sarana dalam sektor-sektor yang bersangkutan.

Dana pembiayaan Pemerintah Pusat dalam bentuk Program Bantuan Inpres dimaksudkan untuk membantu daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Mengenai jenis bantuan, kriteria dan sasaran dari Program Bantuan Inpres ini dapat diperinci sebagai berikut:

Jenis Inpres	Kriteria	Sasaran	Tujuan
1. Bantuan Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Penduduk	Peningkatan prasarana jalan, jembatan, dan irigasi	Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja.
2. Inpres Sekolah Dasar	Jumlah penduduk Usia Sekolah Dasar yang belum tertampung (7-12 tahun)	Meningkatkan daya tampung dan fasilitas Sekolah Dasar	Pemerataan memperoleh fasilitas pendidikan.
3. Inpres Kesehatan	Jumlah dan luas kecamatan	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan	Pemerataan memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Inpres Penunjang Jalan	Daerah terisolasi	Meningkatkan prasarana jalan dan jembatan	Membuka isolasi daerah dan peningkatan produksi
5. Inpres Penghijauan dan Reboisasi	Luas daerah kritis	Penghijauan dan reboisasi	Rehabilitasi daerah kritis
6. Inpres Desa	Jumlah desa	Peningkatan prasarana perhubungan, produksi, sosial, dan pemasaran	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desanya.

Investasi Pemerintah Daerah, baik Daerah Tingkat I Propinsi maupun Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, berasal dari Tabungan Pemerintah Daerah, yaitu: "Selisih antara jumlah penerimaan daerah dengan jumlah belanja rutin daerah" dan tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber pendapatan (penerimaan) daerah dapat diperinci atas dua bagian utama yaitu: (1) Subsidi dari Pemerintah Pusat; dan (2) Pendapatan Asli Daerah Sendiri. Dari kedua sumber pendapatan tersebut maka subsidi dari Pemerintah Pusat memberikan sumbangan yang jauh lebih besar. Pada akhir Pelita Ketiga tahun 1983/84 peranan subsidi Pemerintah Pusat dalam APBD Tingkat I Sumatera Barat adalah sekitar 84,0% dan pada akhir Pelita Ketiga tahun 1983/84 meningkat menjadi 84,8%. Sedangkan peranan subsidi dalam APBD seluruh Daerah Tingkat II di Sumatera Barat dalam tahun 1980/81 adalah sebesar Rp 5.072,3 juta yaitu kira-kira 49,4%.<sup>1</sup> Keadaan tersebut me-

<sup>1</sup>Drs. Rustian Kamaluddin dan Drs. Iswandi Iskandar, *Potensi dan Disparitas Pembiayaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya di Sumatera Barat*, Universitas Andalas, Padang, 1982, hal. 40.

Tabel 3

SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
MENURUT JENIS DI SUMATERA BARAT, 1969/70 - 1983/84  
(dalam juta rupiah)

Tahun	Proyek Sektoral	Bantuan Inpres	APBD Tingkat I	APBD Tingkat II	Jumlah
1969/70	1.531,9	70,0	248,7	74,9	1.925,5
1970/71	1.944,1	234,0	550,0	165,6	2.893,7
1971/72	2.783,6	335,8	273,4	82,3	3.475,1
1972/73	5.592,4	424,5	467,0	140,6	6.624,5
1973/74	4.700,6	779,9	632,3	190,3	6.303,1
<i>Pelita I</i>	<i>16.552,6</i>	<i>1.844,2</i>	<i>2.371,4</i>	<i>653,7</i>	<i>21.421,9</i>
1974/75	5.807,5	1.807,4	1.511,5	515,0	9.641,1
1975/76	13.065,4	3.053,7	2.216,4	1.002,9	19.338,4
1976/77	17.650,4	4.380,4	2.480,4	2.418,4	26.929,6
1977/78	22.243,2	4.890,3	3.439,2	1.166,6	31.739,3
1978/79	28.731,5	5.688,4	3.450,0	1.437,8	39.307,7
<i>Pelita II</i>	<i>87.498,0</i>	<i>21.800,2</i>	<i>13.097,5</i>	<i>6.560,7</i>	<i>128.956,4</i>
1979/80	38.046,0	6.678,0	3.479,0	2.849,0	51.052,0
1980/81	66.269,5	13.014,0	6.067,0	3.822,0	89.172,5
1981/82	68.956,0	25.173,0	8.107,0	4.499,0	106.735,0
1982/83	70.757,0	24.872,0	11.216,0	5.625,0	112.470,0
1983/84	85.535,0	20.363,0	9.912,0	7.056,0	122.866,0
<i>Pelita III</i>	<i>329.563,5</i>	<i>99.273,0</i>	<i>38.781,0</i>	<i>23.851,0</i>	<i>491.468,5</i>
Laju Pertumbuhan (%)					
Pelita I	32,4	49,4	26,3	26,3	34,5
Pelita II	43,6	48,8	40,4	40,8	44,2
Pelita III	24,4	29,1	23,5	37,5	25,6

Sumber: <sup>a</sup> Angka 1979/80 - 1983/84: *Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Dati I Sumatera Barat*, Padang, 1983.

<sup>b</sup> Angka 1969/70 - 1978/79, (tidak termasuk APBD Tingkat II): Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, *Hasil-hasil Pembangunan Pelita I dan Pelita II dan Pelaksanaan Pelita III di Sumatera Barat* (Angka Inpres direvisi dengan mengeluarkan Inpres Pasar dan Per tokoan).

<sup>c</sup> APBD Tingkat II, 1974/75 - 1978/79: Drs. Rustian Kamaluddin dan Drs. Iswandi Iskandar, *Potensi dan Disparitas Pembiayaan Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya di Sumatera Barat*, Universitas Andalas, Padang, 1982, hal. 21.

<sup>d</sup> APBD Tingkat II, 1969/70 - 1973/74: merupakan angka perkiraan.



nunjukkan pula bahwa Tabungan Pemerintah Daerah sangat tergantung dari subsidi Pemerintah Pusat.

Dengan memperhatikan besarnya pembiayaan pemerintah pada masing-masing sumber tersebut di atas maka ternyata bahwa sebagian besar dari investasi pemerintah di Sumatera Barat berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk proyek-proyek sektoral maupun berupa program bantuan Inpres. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sumber investasi pemerintah di Sumatera Barat sebagian besar berasal dari luar daerah. Pada Pelita Kesatu Investasi Pemerintah Pusat tersebut berjumlah Rp 18,4 milyar, Pelita Kedua Rp 109,3 milyar, dan Pelita Ketiga Rp 428,8 milyar. Dibandingkan dengan seluruh investasi pemerintah dalam periode tersebut di atas, maka peranan investasi Pemerintah Pusat adalah: Pelita Kesatu 86,0%, Pelita Kedua, 84,7%, dan Pelita Ketiga 87,3%. Ini berarti bahwa dalam tiga masa Pelita di atas peranan investasi Pemerintah Pusat di daerah Sumatera Barat telah semakin meningkat, sebaliknya peranan investasi Pemerintah Daerah telah semakin mengecil.

Perkembangan sejak masa Pelita Kesatu sampai akhir Pelita Ketiga menunjukkan bahwa investasi pemerintah di Sumatera Barat telah meningkat cukup pesat. Laju pertumbuhan total investasi pemerintah secara rata-rata dalam Pelita Kesatu adalah 34,5% per tahun, dalam Pelita Kedua meningkat menjadi 44,2% namun dalam Pelita Ketiga menurun menjadi 25,6%. Keadaan laju pertumbuhan seperti di atas ternyata dialami oleh hampir setiap sumber, yaitu meningkat dalam Pelita Kedua dan menurun kembali dalam masa Pelita Ketiga. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan investasi pemerintah menurut masing-masing sumber dapat diperhatikan dalam Tabel 3.

Oleh karena investasi pemerintah di daerah Sumatera Barat sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat, maka perkembangannya jelas dipengaruhi oleh perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya anggaran pembangunan pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk mengukur besarnya investasi pemerintah dalam pembangunan daerah Sumatera Barat perlu dibandingkan dengan besarnya jumlah APBN. Hal ini akan dapat dilihat dari segi jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) dan jumlah penduduk, yaitu seperti tergambar dalam Tabel 4.

Dari angka-angka Tabel 4 ternyata bahwa laju pertumbuhan investasi pemerintah secara nasional adalah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan investasi pemerintah di Sumatera Barat. Namun laju pertumbuhan yang tinggi tersebut juga diiringi oleh laju pertumbuhan PDB dan penduduk yang tinggi pula.

Tabel 4

PERBANDINGAN INVESTASI PEMERINTAH DENGAN PDB DAN  
JUMLAH PENDUDUK DI SUMATERA BARAT DAN INDONESIA, 1969-1990

Tahun	Indonesia			Sumatera Barat		
	PDB	Investasi	Penduduk	PDB	Investasi	Penduduk
1969/70	2.718	118	114.977	63	2	2.673
1973/74	6.753	451	126.083	135	6	2.916
1978/79	22.746	2.556	141.403	345	39	3.292
1983/84	72.513	9.290	158.100	949	123	3.626
<i>Repelita IV</i>						
1984/85	83.114	10.459	161.600	1.097	125	3.703
1985/86	95.034	13.171	165.200	1.261	145	3.781
1986/87	107.871	15.472	168.700	1.444	168	3.861
1987/88	121.539	18.115	172.200	1.644	195	3.944
1988/89	135.917	20.524	175.600	1.865	225	4.028
1989/90	152.708	23.623	179.300	2.115	261	4.114
1990/91	171.590	27.190	183.100	2.399	303	4.202
Laju Pertumbuhan (%)						
Pelita I	25,5	39,8	2,3	20,9	31,6	2,2
Pelita II	27,5	41,5	2,3	20,6	45,4	2,1
Pelita III	26,1	29,5	2,3	22,4	25,8	2,2
1969/70 - 1983/84	26,4	36,6	2,3	21,4	34,2	2,2

Dibandingkan dengan PDB, maka besarnya investasi pemerintah secara nasional akhir Pelita Kesatu, Kedua, dan Ketiga berturut-turut adalah 6,7%, 11,2%, dan 12,8%. Sedangkan perbandingan yang sama di Sumatera Barat adalah: 4,4%, 11,3%, dan 13,0%. Angka-angka ini berarti bahwa peranan investasi pemerintah dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di daerah ini relatif lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Keadaan ini dialami sejak akhir Pelita Kedua sampai akhir Pelita Ketiga.

Dibandingkan dengan seluruh investasi pemerintah secara nasional, maka persentase investasi pemerintah di Sumatera Barat dalam tahun 1969/70 adalah sekitar 1,7%. Pada akhir Pelita Kesatu menurun menjadi 1,3%, akhir Pelita Kedua naik menjadi 1,9%, dan akhir Pelita Ketiga tahun 1983/84 turun kembali menjadi sebesar 1,3%. Dari angka-angka ini terlihat bahwa alokasi

investasi Pemerintah Pusat (APBN) ke daerah Sumatera Barat secara relatif telah agak semakin menurun.

Dengan memperhatikan sumber-sumber investasi pemerintah dalam pembangunan daerah Sumatera Barat di mana sebagian besar berasal dari investasi Pemerintah Pusat, maka perkembangannya juga sangat ditentukan oleh perkembangan dana APBN. Hubungan ini terutama sekali terdapat pada investasi dalam bentuk proyek-proyek sektoral dan bantuan Inpres yang sumber dananya berasal dari APBN. Dengan memperhatikan laju pertumbuhan APBN dan proyek sektoral serta program bantuan Inpres selama periode 1969/70 - 1983/84 maka terdapat angka elastisitas proyek sektoral sebesar 0,91 dan Bantuan Inpres sebesar 1,03. Angka ini berarti bahwa kenaikan APBN sebesar 1% ternyata telah menyebabkan meningkatnya alokasi investasi proyek sektoral ke Sumatera Barat sebesar 0,91% dan alokasi dana bantuan Inpres sebesar 1,03%.

Berdasarkan kepada uraian-uraian di atas dan dengan memperhatikan perkiraan jumlah APBN serta potensi pembiayaan yang dapat digali dalam masa mendatang maka jumlah investasi pemerintah dalam pembangunan daerah Sumatera Barat dalam masa mendatang dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5

PERKIRAAN SUMBER INVESTASI PEMERINTAH MENURUT JENIS,  
1983/84 - 1990/91 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Proyek Sektoral	Bantuan Inpres	Tabungan Dati I	Tabungan Dati II	Jumlah
1984/85	73,4 <sup>a</sup>	31,5	13,5 <sup>b</sup>	6,8	125,2
1985/86	84,0	36,8	16,7	7,9	145,4
1986/87	96,1	43,0	20,0	9,0	168,1
1987/88	109,9	50,2	24,0	10,4	194,5
1988/89	125,7	56,7	28,8	12,0	225,2
1989/90	143,8	68,6	34,8	13,8	261,0
1990/91	164,5	80,1	42,2	15,9	302,7
Laju Pertumbuhan (%)	14,4	16,8	20,9	15,2	15,9

<sup>a</sup> Merupakan Daftar Isian Proyek (DIP) yang disetujui.

<sup>b</sup> Merupakan angka anggaran pembangunan dalam APBD 1984/85.

Sumber: Angka-angka 1984/85 - 1988/89 dari *Rancangan Repelita IV Propinsi Sumatera Barat*, dan angka-angka 1989/90 - 1990/91, perkiraan.

Dari angka-angka pada Tabel 5 terlihat bahwa jumlah investasi pemerintah akan mencapai Rp 858,4 milyar dalam masa Repelita Keempat (1984/85 - 1988/89) sedangkan dalam periode 1984/85 - 1990/91 diperkirakan akan berjumlah Rp 1.422,1 milyar. Dibandingkan dengan jumlah dalam Pelita Ketiga sebesar Rp 491,5 milyar, maka terdapat kenaikan sebesar 74,6% dalam Repelita Keempat dan 189,3% dalam periode 1984/85 - 1990/91.

Dalam masa 1984/85 - 1990/91 laju pertumbuhan investasi pemerintah ini diperkirakan meningkat rata-rata 15,9% per tahun. Angka ini relatif lebih besar dari angka laju pertumbuhan APBN dalam masa Repelita Keempat sebesar 15,1% per tahun. Namun dibandingkan dengan laju pertumbuhan dalam Pelita Ketiga sebesar 25,6%, maka laju pertumbuhan dalam masa tersebut di atas jauh lebih rendah. Penurunan angka laju pertumbuhan ini pada umumnya akan dialami oleh seluruh sumber investasi pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi karena laju pertumbuhan anggaran pembangunan Pemerintah Pusat dalam masa tersebut juga akan menurun yaitu hanya mencapai 16,6% per tahun. Penurunan ini jelas akan mempengaruhi pula alokasi APBN ke daerah, termasuk ke Sumatera Barat.

Dalam masa Repelita Keempat, sebesar Rp 489,1 milyar atau 57,0% dari seluruh dana investasi pemerintah di daerah ini berasal dari investasi proyek sektoral. Investasi berupa program Bantuan Inpres berjumlah Rp 220,2 milyar atau 25,7%, APBD Tingkat I sebesar Rp 103,0 milyar atau 12,0%, dan APBD Tingkat II sebesar Rp 46,1 milyar atau 5,3%. Berarti peranan investasi Pemerintah Pusat dalam Repelita Keempat akan mencapai 82,7% dari seluruh investasi pemerintah di daerah Sumatera Barat. Dalam Pelita Ketiga peranan investasi Pemerintah Pusat tersebut adalah 87,5%. Sedangkan dalam Pelita Kesatu dan Kedua masing-masing sebesar 86,0% dan 84,7%. Dengan demikian berarti bahwa peranan investasi Pemerintah Pusat dalam masa Repelita Keempat relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan masa-masa Pelita sebelumnya. Ini berarti pula bahwa peningkatan investasi pemerintah dari APBD Tingkat I dan Tingkat II perlu ditingkatkan lebih besar dalam masa Repelita Keempat, dibandingkan dengan sumber investasi pemerintah lainnya.

## MASALAH DAN KEBIJAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah investasi pemerintah sejak masa Pelita Kesatu sampai akhir masa Pelita Ketiga maka dapat dikatakan telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada semua sumber. Namun demikian melihat komposisinya, di mana sebagian besar sumber pembiayaannya berasal dari luar daerah yaitu dari Pemerintah Pusat, maka dalam usaha peningkatannya akan lebih banyak ditentukan oleh kebijaksanaan Pemerintah

Pusat. Sedangkan untuk meningkatkan investasi yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri terbentur kepada terbatasnya potensi sumber pendapatan atau pungutan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik oleh Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Oleh sebab itu untuk meningkatkan investasi pemerintah dalam pembangunan daerah Sumatera Barat dalam masa mendatang masih akan tetap lebih banyak diharapkan dari sumber Pemerintah Pusat.

Kebijaksanaan alokasi investasi pemerintah menurut sektor dimaksudkan antara lain untuk menunjang terwujudnya sistem perekonomian yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi, di mana peranan yang lebih besar akan diberikan kepada usaha swasta dan koperasi. Dalam hal ini peranan pemerintah terutama adalah untuk mendorong terlaksananya sistem yang sehat dalam berusaha, yaitu dengan menciptakan prasarana, sarana, dan fasilitas pelayanan ekonomi dan pelayanan sosial yang diperlukan. Di samping itu kebijaksanaan investasi pemerintah dikaitkan pula dengan tugas-tugas yang dijalankannya, yang dapat dibagi atas tiga macam yaitu: (1) tugas pemerintah umum; (2) tugas pembangunan; dan (3) tugas kemasyarakatan. Di dalam tugas pembangunan, maka arah dari investasi adalah pada bidang prasarana dan sarana serta fasilitas yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di dalam tugas pemerintahan diperlukan pula investasi untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, baik dalam bentuk penyediaan sarana fisik perkantoran dan mobilitas, maupun dalam bentuk peralatan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tugas kemasyarakatan diperlukan pula investasi untuk menyediakan fasilitas pelayanan sosial yang diperlukan masyarakat.

Dalam kaitan dengan tugas-tugas tersebut di atas, maka arah investasi pemerintah dapat dibagi atau dikelompokkan menurut tiga bidang, yaitu: bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang umum. Masing-masing bidang dapat dibagi pula atas beberapa sektor yaitu sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 6.

Sesuai dengan kebijaksanaan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Barat, yaitu memprioritaskan pembangunan bidang ekonomi maka arah dan kebijaksanaan investasi pemerintah ternyata sudah sejalan dengan kebijaksanaan tersebut. Sejak masa Pelita Kesatu, Kedua, dan Ketiga, sebagian besar investasi pemerintah di Sumatera Barat telah dititikberatkan kepada bidang ekonomi. Dalam masa Pelita Ketiga alokasi investasi pada bidang ekonomi berjumlah Rp 302,5 milyar atau lebih kurang 61,8% dari seluruh investasi. Pada bidang sosial dialokasikan sekitar 27,1% dan bidang umum sebesar 11,1%. Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi investasi menurut bidang dan sektor dalam masa Pelita Ketiga dan Repelita Keempat dapat diperhatikan Tabel 6.

Tabel 6

**RENCANA REALISASI DANA INVESTASI PEMERINTAH MENURUT  
 BIDANG/SEKTOR SELAMA REPELITA IV DIBANDINGKAN  
 DENGAN PELITA III (dalam milyar rupiah)**

Bidang/Sektor	Pelita III		Pelita IV	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>A. Bidang Ekonomi</b>	<b>302,5</b>	<b>61,8</b>	<b>561,4</b>	<b>65,4</b>
1. Pertanian dan irigasi	107,1	21,9	198,2	23,1
2. Industri	1,9	0,4	8,6	1,0
3. Pertambangan dan energi	35,8	7,3	56,7	6,6
4. Perhubungan dan pariwisata	119,5	24,4	226,6	36,4
5. Perdagangan dan Koperasi	16,0	3,2	20,6	2,4
6. Penduduk dan transmigrasi	15,0	3,1	31,8	3,7
7. Pembangunan daerah, desa dan kota	7,0	1,5	18,9	2,2
<b>B. Bidang Sosial</b>	<b>133,1</b>	<b>27,1</b>	<b>201,7</b>	<b>23,5</b>
8. Agama	6,5	1,3	12,0	1,4
9. Pendidikan, generasi muda, Ketuhanan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	89,5	18,8	120,2	14,0
10. Kesehatan, kesejahteraan sosial, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana	28,4	5,8	51,5	6,0
11. Perumahan dan pemukiman	8,6	1,7	8,0	2,1
<b>C. Bidang Umum</b>	<b>54,3</b>	<b>11,1</b>	<b>95,3</b>	<b>11,1</b>
12. Hukum	8,5	1,7	14,6	1,7
13. Pertahanan dan keamanan	0,3	0,1	1,7	1,2
14. Penerangan dan komunikasi	3,7	0,8	7,7	0,9
15. Ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian	10,1	2,0	18,0	2,2
16. Aparatur pemerintah	22,0	4,5	35,2	4,1
17. Sumber alam dan lingkungan hidup	9,7	2,0	17,2	2,0
<b>Jumlah</b>	<b>491,3</b>	<b>100,0</b>	<b>858,4</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, *Rancangan Replita Keempat 1984/85 - 1988/89 Daerah Sumatera Barat*, Buku I, hal. 7.11.

Alokasi dana investasi pada bidang ekonomi dititikberatkan kepada dua sektor, yaitu sektor prasarana perhubungan dan pariwisata dan sektor pertanian dan irigasi. Alokasi dana pada sektor perhubungan antara lain dikaitkan dengan usaha untuk memperlancar arus transportasi guna mendorong peningkatan produksi masyarakat. Sedangkan investasi dalam sektor perta-

nian diarahkan kepada pembangunan saluran irigasi dan bendungan irigasi dalam rangka membantu usaha peningkatan produksi pangan, khususnya padi sawah.

Dalam masa Repelita Keempat alokasi investasi pemerintah masih dititikberatkan kepada bidang ekonomi dengan prioritas masih pada sektor prasarana dan pertanian. Peranan dana investasi dalam masa ini mencapai 65,4% yang berarti lebih besar dibandingkan dengan selama periode Pelita Ketiga. Selanjutnya bidang sosial dan bidang umum masing-masing menyerap dana investasi sebesar 23,5% dan 11,1% dari seluruh dana yang ada. Dalam bidang sosial perhatian utama dari arah investasi ini masih diberikan kepada sektor pendidikan dan kesehatan, di mana masing-masing memperoleh dana sebesar 14,0% dan 6,0% dari seluruh dana yang tersedia.

Dengan memperhatikan pola kebijaksanaan investasi pemerintah dalam masa Pelita Ketiga dan Repelita Keempat, maka dalam masa-masa selanjutnya, khususnya sampai tahun 1990/91 pola tersebut diperkirakan masih perlu dilanjutkan. Investasi dalam bidang ekonomi, yaitu pada sektor prasarana perhubungan, khususnya perhubungan darat masih diperlukan antara lain dalam bentuk pembukaan jalan-jalan baru guna membuka isolasi daerah yang masih cukup banyak terdapat di Sumatera Barat. Selanjutnya alokasi dana investasi pada sektor pertanian perlu pula ditingkatkan mengingat target Sumatera Barat dalam produksi padi masih akan meningkat dalam masa-masa mendatang. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi investasi pada sektor pertambangan dan energi. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat potensi dalam kedua sektor tersebut cukup besar di daerah Sumatera Barat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat yang akan meningkat sebesar 6,0% per tahun dalam masa Repelita Keempat dan rata-rata sebesar 6,3% per tahun dalam periode 1983-1990 diperlukan peningkatan yang cukup besar dalam jumlah investasi. Peningkatan investasi yang diperlukan adalah sebesar Rp 1.836,3 milyar selama masa Repelita Keempat dan mencapai Rp 3.162,1 milyar dalam periode 1984/85 - 1990/91. Untuk itu laju pertumbuhan investasi perlu ditingkatkan rata-rata 24,1% per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut di atas, maka sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari sektor pemerintah dan non-pemerintah perlu pula ditingkatkan. Dalam masa 1969/70 - 1983/84 kedua sumber dana investasi tersebut telah berhasil pula ditingkatkan. Sampai akhir masa Pelita

Ketiga kecenderungan yang terjadi adalah relatif semakin meningkatnya peranan investasi pemerintah dalam pembangunan daerah Sumatera Barat. Peranannya secara berturut-turut adalah: Pelita Kesatu 53,5%, Pelita Kedua 45,4%, dan Pelita Ketiga sebesar 53,9%. Namun mulai periode Repelita Keempat peranan investasi pemerintah tersebut mulai menurun sehingga hanya akan mampu membiayai sekitar 46,7% dari seluruh kebutuhan investasi pada periode tersebut. Sedangkan dalam periode 1984/85 - 1990/91 peranan investasi pemerintah tersebut akan menurun mencapai 45,0%. Ini berarti bahwa peranan sektor non-pemerintah akan lebih banyak diharapkan dalam memenuhi kebutuhan dana investasi dalam masa mendatang.

Penurunan pertumbuhan investasi pemerintah dalam masa mendatang terutama disebabkan karena penurunan pertumbuhan yang dialami oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini selanjutnya akan berpengaruh kepada alokasi anggaran pembangunan ke daerah, baik dalam bentuk proyek sektoral dan bantuan Inpres, maupun berupa subsidi pembangunan ke Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Laju pertumbuhan investasi pemerintah dalam masa Repelita Keempat hanya diperkirakan meningkat rata-rata 13,7% dalam masa Repelita Keempat dan sebesar 15,9% dalam periode 1984/85 - 1990/91. Sedangkan dalam masa Pelita Ketiga mampu mencapai laju peningkatan 25,8% per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pemerintah yang akan meningkat dalam masa mendatang, maka sebagian besar masih diharapkan dipenuhi oleh investasi Pemerintah Pusat. Dalam masa 1984/85 - 1990/91 peranan investasi Pemerintah Pusat tersebut diharapkan sebesar 82,7%, sedangkan dalam masa sebelumnya adalah sebesar 87,3%. Ini berarti pula bahwa peranan investasi Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan lebih besar dalam masa mendatang, yaitu dengan mendorong usaha penggalian pendapatan asli daerah, dengan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan-pungutan lainnya.

Kebijakan investasi pemerintah dalam masa mendatang masih tetap perlu diarahkan kepada bidang ekonomi. Peranan yang lebih besar masih perlu diarahkan untuk pembangunan prasarana perhubungan dan sektor pertanian. Investasi untuk sektor prasarana diperlukan sekitar 26,4% dan sektor pertanian sebesar 23,1%. Di samping itu usaha-usaha keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan, efisiensi penggunaan dana pembangunan, dan lain-lainnya perlu lebih mendapat perhatian dan lebih ditingkatkan di masa-masa mendatang.





Kepercayaan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh masyarakat Indonesia, serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu siap sedia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta harus selalu siap sedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kepercayaan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh masyarakat Indonesia, serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu siap sedia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta harus selalu siap sedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kepercayaan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh masyarakat Indonesia, serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu siap sedia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta harus selalu siap sedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kepercayaan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh masyarakat Indonesia, serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu siap sedia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta harus selalu siap sedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.